



Article Informations  
Corresponding Email:  
meylanreginal@gmail.com

Received: 28/07/2025; Accepted:  
25/09/2025; Published: 15/10/2025

## **SIKAP INDONESIA MENGHADAPI ANCAMAN SANKSI COUNTERING AMERICA' S ADVERSARIES THROUGH SANCTIONS ACT (CAATSA)**

**Meylan Regina Lukita**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Countering America' s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) merupakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang bersifat ekstrateritorial, CAATSA memungkinkan Amerika Serikat sebagai salah satu negara berkekuatan besar untuk mengenakan sanksi terhadap negara yang bertransaksi dengan pihak-pihak yang disanksi, seperti Rusia. Ancaman sanksi ini dirasakan oleh Indonesia dalam pemenuhan modernisasi alutsista negara. Kerja sama antara Indonesia dan Rusia dalam pembelian alutsista dianggap sebagai ancaman kepentingan nasional Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat respon Indonesia atas ancaman Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara yang relevan. Hasilnya Indonesia tetap mempertahankan kebijakan luar negeri bebas aktif disertai diplomasi intensif dengan Amerika Serikat dan Rusia, mengambil posisi netral sambil mempertahankan kepentingan nasional di tengah ketegangan geopolitik. Indonesia juga melakukan upaya penguatan industri dalam negeri dan diversifikasi sumber alutsista ke negara-negara lain. Menjelaskan bahwa Indonesia sebagai aktor rasional dapat mengendalikan tekanan eksternal sambil memprioritaskan keamanan, dengan mempertimbangkan dinamika kebijakan CAATSA.

**Kata Kunci:** Indonesia, CAATSA, Kebijakan Luar Negeri, Pertahanan

### **Abstract**

*Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) is an extraterritorial United States foreign policy, CAATSA allows the United States as one of the major powers to impose sanctions on countries that deal with sanctioned parties, such as Russia. The threat of sanctions is felt by Indonesia in fulfilling the modernization of the country's defense equipment. Cooperation between Indonesia and Russia in the purchase of defense equipment is considered a threat to the national interests of the United States. This research aims to see Indonesia's response to the*

*threat of the United States. The research method used is a qualitative research method using relevant literature studies and interviews. The result is that Indonesia maintains a free and active foreign policy accompanied by intensive diplomacy with the United States and Russia, taking a neutral position while maintaining national interests amid geopolitical tensions. Indonesia also made efforts to strengthen the domestic industry and diversify defense equipment sources to other countries. Explaining that Indonesia as a rational actor can control external pressures while prioritizing security, taking into account the dynamics of the CAATSA policy.*

**Keywords:** *Indonesia, CAATSA, Foreign Policy, Defense*

## 1. PENDAHULUAN

Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) adalah salah satu kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang bersifat ekstrateritorial. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menangani ancaman terhadap keamanan dan kepentingan global Amerika Serikat melalui sanksi ekonomi. Kebijakan ini ditandatangani oleh Presiden Donald J. Trump pada agustus 2017, CAATSA dapat berlaku untuk negara yang terlibat dalam transaksi penting dengan sektor pertahanan atau intelijen Rusia, Iran, dan Korea Utara yang berpotensi merugikan Amerika Serikat.<sup>1</sup> Melalui pejabat tinggi seperti Undersecretary International Security Weapon Non Proliferation, Ms Ann Gancer, Amerika Serikat secara terang-terangan memperingatkan Indonesia tentang ancaman sanksi jika melanjutkan pengadaan alutsista dari Rusia.<sup>2</sup> Hal ini melihat dari adanya kerja sama pengadaan pesawat tempur untuk memodernisasi alutsista Negara.

Pada 10 Agustus 2017, Indonesia dan Rusia melakukan kesepakatan kerja sama dalam pembelian pesawat tempur jenis Sukhoi-35, dan kontrak kerja sama tersebut ditandatangani pada 14 Februari 2018.<sup>3</sup> Sesuai dengan pasal 231 CAATSA menetapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat dapat memberlakukan sanksi terhadap individu yang melakukan transaksi

---

<sup>1</sup> Jihan Annisa, et al., "Analisis Keputusan Amerika Serikat dalam Mengeluarkan Kebijakan Countering America's Adversaries Through Sanction Act (CAATSA) terhadap Rusia," Indonesian Journal of Global Discourse. Vol. 3 No.2 (2021), online, internet, 10 Juli 2025, <https://ijgd.unram.ac.id/index.php/ijgd/article/download/37/25#:~:text=>

<sup>2</sup> Hendrajati, "UU CAATSA AS Berpotensi Melumpuhkan Kedaulatan Nasional RI di Bidang Pertahanan." The Global Review. (24 Oktober 2019) internet. 10 Juli 2025, <https://theglobal-review.com/uu-caatsa-as-berpotensi-melumpuhkan-kedaulatan-nasional-ri-di-bidang-pertahanan/> vvv

<sup>3</sup> Kemhan.go.id, "Skema Imbal Beli SU-35 Indonesia-Rusia, Tingkatkan Pertahanan dan Ekspor Nasional", Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, (22 Agustus 2017), internet, 10 Juli 2025, <https://www.kemhan.go.id/2017/08/22/10557.html>

signifikan dengan sektor intelijen atau pertahanan Pemerintah Federasi Rusia.<sup>4</sup> Walaupun Indonesia belum menjadi target langsung sanksi CAATSA, seperti yang dialami Tiongkok dan Turki atas pembelian senjata Rusia. Tetapi, kunjungan Ms Ann Gancer ke Indonesia ini menjadi suatu peringatan bagi Indonesia dan ancaman terhadap Pemerintahan Republik Indonesia jika melanjutkan kerja sama dengan Rusia. Hingga tahun 2022, Indonesia belum menjadi sasaran langsung sanksi CAATSA. Namun, pernyataan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyova, yang menyatakan bahwa kontrak Sukhoi-35 belum dibatalkan secara resmi.<sup>5</sup>

Sikap Indonesia sesuai dengan pendekatan neorealisme menurut Kenneth Waltz, yang melihat setiap tindakan negara didasari oleh keinginan untuk bertahan dalam sistem internasional yang anarki.<sup>6</sup> Indonesia mempertahankan kepentingan nasionalnya tanpa merubah kebijakan luar negeri bebas aktif dalam kerja sama pertahanan meskipun menghadapi ancaman CAATSA. Hal ini dilakukan sebagai upaya rasional negara untuk memperkuat keamanan nasional dan menjaga keseimbangan kekuatan sambil menghindari ketergantungan pada satu kekuatan besar.

Ancaman sanksi CAATSA yang diberlakukan Amerika Serikat jelas mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam bidang pertahanan dan diplomasi strategis. Indonesia harus menyesuaikan respons kebijakan agar tetap menjaga kepentingan nasional agar terhindar dari sanksi ekonomi dan militer Amerika Serikat. Ini menegaskan bahwa dinamika hubungan internasional, khususnya melalui tekanan sanksi ekstrateritorial, menjadi faktor penting untuk membuat kebijakan luar negeri yang relevan demi memahami strategi Indonesia di tengah rivalitas kekuatan besar. Pendekatan konseptual kebijakan luar negeri menurut Kenneth N. Waltz dalam hal ini digunakan untuk melihat bagaimana Indonesia dapat mempertahankan kebijakan luar negerinya. Terdapat empat

---

<sup>4</sup> U.S. Department of State, "Section 231 of the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act of 2017", Bureau of International Security and Nonproliferation, internet, 10 November 2024, [https://www-state-gov.translate.goog/section-231-of-the-countering-americas-adversaries-through-sanctions-act-of-2017?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-state-gov.translate.goog/section-231-of-the-countering-americas-adversaries-through-sanctions-act-of-2017?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)

<sup>5</sup> Tass New Agency, "Su-35 jet deal between Russia, Indonesia 'still on the table' - Russian envoy", (23 Januari 2025) internet, 16 April 2025, <https://tass.com/politics/1903331/amp>.

<sup>6</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional Edisi Kelima. (2013) Bab 3 Hal. 137.

asumsi kebijakan luar negeri menurut Kenneth N. Waltz dalam bukunya *Theory of International Politics* yaitu, rasionalitas untuk keamanan dan kelangsungan hidup, fokus pada kekuatan relatif dan keseimbangan kekuatan, *self-help* dalam sistem anarki, kepentingan nasional minimalis berbasis pertahanan.<sup>7</sup> Sangat tepat diterapkan untuk menganalisis setiap pertimbangan, adaptasi, dan langkah diplomasi yang diambil Indonesia dalam merespons tekanan CAATSA. Sehingga nantinya dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika pilihan kebijakan nasional di ranah global.

## **2. PEMBAHASAN**

Terdapat empat asumsi kebijakan luar negeri menurut Kenneth N. Waltz dalam bukunya *Theory of International Politics* yaitu, rasionalitas untuk keamanan dan kelangsungan hidup, fokus pada kekuatan relatif dan keseimbangan kekuatan, *self-help* dalam sistem anarki, kepentingan nasional minimalis berbasis pertahanan.<sup>8</sup> Sangat tepat diterapkan untuk menganalisis setiap pertimbangan, adaptasi, dan langkah diplomasi yang diambil Indonesia dalam merespons tekanan CAATSA. Sehingga nantinya dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika pilihan kebijakan nasional di ranah global.

Asumsi mengenai kebijakan luar negeri menurut Kenneth N Waltz yang pertama adalah rasionalitas untuk keamanan dan kelangsungan hidup. Menurut Kenneth N Waltz negara merupakan aktor rasional dalam sistem internasional yang anarki, sehingga setiap tindakannya diarahkan untuk menjamin keamanan dan kelangsungan hidup.<sup>9</sup> Rasionalitas ini mendorong negara untuk membuat keputusan yang paling menguntungkan dalam mempertahankan stabilitas negara dan menghadapi ancaman eksternal. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam menghadapi

---

<sup>7</sup> Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics* (University of California: 1979), internet, 10 Mei 2025, [https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/486328/mod\\_resource/content/0/Kenneth N. Waltz Theory of International Politics Addison-Wesley series in political science 1979.pdf](https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/486328/mod_resource/content/0/Kenneth_N._Waltz_Theory_of_International_Politics_Addison-Wesley_series_in_political_science_1979.pdf) vv

<sup>8</sup> Ibid. Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics*.

<sup>9</sup> Ibid. Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics*.

ancaman sanksi CAATSA, Indonesia berusaha mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara di tengah sistem internasional yang anarki.

Pemerintah melakukan perhitungan manfaat kerja sama dengan Rusia terhadap risiko sanksi CAATSA. Pernyataan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyova, yang menyatakan bahwa kontrak Sukhoi-35 belum dibatalkan secara resmi.<sup>10</sup> Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia memilih menunda pelaksanaan kontrak Sukhoi-35 daripada mengambil sikap langsung secara jelas membatalkan atau melanjutkannya secara terbuka, sehingga ruang diplomasi tetap terjaga baik dengan Amerika Serikat dan Rusia. Indonesia juga aktif menjalankan diplomasi melalui berbagai forum dan pertemuan bilateral atau multilateral dengan Amerika Serikat dari tahun 2015 hingga 2024, seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM), Indonesia-US Security Dialogue (IUSSD), G20 serta pertemuan dengan pejabat tinggi pertahanan Amerika Serikat dan Rusia.<sup>11</sup>

Indonesia sulit untuk dimasukkan ke dalam satu blok kekuatan karena peran strategisnya sebagai negara utama di kawasan Indo-Pasifik. Dialog intensif dengan Amerika Serikat juga bertujuan untuk mendorong potensi waiver atau pengecualian sanksi. Data yang diperoleh memperkuat pandangan bahwa negara bertindak secara rasional dalam upaya menjaga keamanan dan kelangsungan hidupnya. Indonesia tidak terpengaruh oleh satu tekanan negara saja, sebaliknya Indonesia mempertimbangkan langkah strategis agar modernisasi alutsista bisa tetap berlanjut. Kedua, asumsi Kenneth N. Waltz mengenai kebijakan luar negeri menekankan pentingnya kekuatan relatif dan keseimbangan kekuatan dalam sistem internasional yang bersifat anarki. Waltz menyatakan bahwa negara tidak hanya berusaha memperkuat dirinya secara penuh, tetapi lebih mementingkan posisi kekuatan.<sup>12</sup> Dalam suatu situasi, negara akan terus mengawasi dan mengubah kekuatan untuk mencegah satu pihak yang dapat membahayakan kelangsungan hidupnya.

---

<sup>10</sup> Tass New Agency, "Su-35 jet deal between Russia, Indonesia 'still on the table' - Russian envoy", (23 Januari 2025) internet, 16 April 2025, <https://tass.com/politics/1903331/amp> 11 Ibid U.S. Department of State, Hlm.38.

<sup>11</sup> Ibid. U.S. Department of State, Hlm.38.

<sup>12</sup> Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics* (University of California: 1979), internet, 10 Mei 2025, [https://d11.cuni.cz/pluginfile.php/486328/mod\\_resource/content/0/Kenneth N. Waltz Theory of International Politics Addison-Wesley series in political science 1979.pdf](https://d11.cuni.cz/pluginfile.php/486328/mod_resource/content/0/Kenneth%20N.%20Waltz%20Theory%20of%20International%20Politics%20Addison-Wesley%20series%20in%20political%20science%201979.pdf) vv

Indonesia menjaga keseimbangan dengan Amerika Serikat melalui latihan bersama seperti Super Garuda Shield di tahun 2023 dan pengadaan alutsista.<sup>13</sup> Indonesia membeli alutsista dari Amerika Serikat untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yaitu helikopter AH-64 Apache dan pesawat angkut C-130 Hercules.<sup>14</sup> Indonesia juga mengambil langkah diversifikasi kerja sama militer bukan hanya dengan Amerika Serikat atau Rusia, tetapi ke Tiongkok, India, dan Prancis. Kerja sama militer antar Indonesia dengan Tiongkok mencakup pengadaan teknologi pertahanan seperti rudal anti-kapal C-705 dan C-802, serta kerja sama dengan PT PAL Indonesia untuk pembuatan kapal perang fregat dan kapal selam.<sup>15</sup> Ke India, Indonesia berusaha meningkatkan armada lautnya dengan membeli kapal selam kelas Kilo dan rudal supersonik BrahMos.<sup>16</sup>

Pada tahun 2022 Indonesia dan Prancis memperkuat kerja sama penelitian dan pengembangan kapal selam antara PT PAL dan Naval Group, kesepakatan pembelian enam pesawat tempur Rafale, program offset dan transfer teknologi antara PT Dirgantara Indonesia dan Dassault Aviation, serta produksi munisi kaliber besar antara PT Pindad dan Nexter Munition.<sup>17</sup> Diversifikasi kerja sama pertahanan, merupakan konsep keseimbangan kekuatan yang tercermin dari komitmen Indonesia dalam menjaga hubungan baik dengan Amerika dan negara lain secara bersamaan. Indonesia tidak menunjukkan keberpihakan pada salah satu pihak. Sikap ini selaras dengan

---

<sup>13</sup> Annidya Indirasari, "Kerjasama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat Pada Era Presiden Joko Widodo," *Jurnal Pena Wimaya*. Vol. 2 No. 1 (2021), online, internet, 5 Juli 2025, [https://www.academia.edu/89491721/Indonesian\\_United\\_States\\_Defense\\_Cooperation\\_in\\_the\\_President\\_Joko\\_Widodo\\_Era](https://www.academia.edu/89491721/Indonesian_United_States_Defense_Cooperation_in_the_President_Joko_Widodo_Era)

<sup>14</sup> Alman Helvas, "Menilik Perdagangan Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat." *CNBC Indonesia*. (2023) internet, 5 Juli 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20230404123307-14-427190/menilik-perdagangan-pertahanan-indonesia-dan-amerika-serikat/amp>

<sup>15</sup> Muhammad D dan Ave A, "China Tawarkan Kapal Perang Berpeluru hingga Kapal Selam ke Prabowo Subianto." *KumparanBisnis*. (11 Agustus 2024) internet, 7 Juli 2025.

<sup>16</sup> [Kemhan.go.id](https://www.kemhan.go.id), "Kunjungan Menhan India Perkuat Hubungan RI-India. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (23 Oktober 2018) internet, 7 Juli 2025, <https://www.kemhan.go.id/2018/10/23/kunjungan-menhan-india-perkuat-hubungan-ri-india.html>.

<sup>17</sup> [Kemhan.go.id](https://www.kemhan.go.id), "Menhan Prabowo Terima Kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis." *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*. (10 Februari 2022) internet, 8 Juli 2025, <https://www.kemhan.go.id/2022/02/10/menhan-prabowo-terima-kunjungan-menteri-angkatan-bersenjata-perancis.html>.

teori neorealisme bahwa negara akan menjaga keseimbangan agar tidak mudah di dominasi kekuatan lain.

Ketiga, Kenneth N. Waltz berpendapat bahwa tidak ada otoritas global yang dapat menjamin keamanan negara. Melihat dunia bersifat anarki, negara tidak dapat bergantung pada negara lain untuk melindunginya.<sup>18</sup> Prinsip self-help digunakan setiap negara untuk menjaga keamanannya sendiri. Di tengah ancaman sanksi, Indonesia semakin menekankan prinsip self-help yang sejalan dengan teori neorealisme, yang berarti bahwa negara harus memprioritaskan kemandirian untuk bertahan dalam sistem internasional yang anarki.

Melalui PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia, Indonesia meningkatkan produksi alutsista domestik. Kolaborasi teknologi dan pengembangan bersama seperti pembuatan kapal fregat dan kapal selam antara Tiongkok dengan PT PAL Indonesia.<sup>19</sup> Lalu dengan Prancis, yaitu pengembangan kapal selam dengan PT PAL, program offset dan transfer teknologi dengan PT Dirgantara Indonesia, serta produksi munisi kaliber besar dengan PT Pindad.<sup>20</sup> Indonesia terus melakukan upaya penguatan industri dalam negeri ini seperti joint ventures, joint research, joint development, lalu meminta offsite transfer teknologi dari pengadaan pesawat untuk sustainmentnya dan komponen-komponen dalam negeri. Agar kita mampu memelihara pesawat dan dapat memproduksi sendiri. Indonesia juga berupaya menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Keempat, Menurut Kenneth N. Waltz, negara cenderung memiliki kepentingan nasional yang minimalis berfokus pada keamanan dan pertahanan dalam sistem internasional yang penuh dengan ketidakpastian.<sup>21</sup> Negara tidak selalu berusaha memperluas pengaruh global secara agresif, tetapi lebih mengutamakan stabilitas nasional dan kelangsungan hidup

---

<sup>18</sup> Ibid. Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics*.

<sup>19</sup> Kemhan.go.id, "Menhan Prabowo Hadiri ASEAN-China Defence Ministers' Informal Meeting Secara Virtual." Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (15 Juni 2021) internet, 7 Juli 2025, <https://www.kemhan.go.id/2021/06/15/menhan-prabowo-hadiri-asean-china-defence-ministers-informal-meeting-secara-virtual.html>.

<sup>20</sup> Ibid Kemhan.go.id, Menhan Prabowo Terima Kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis.

<sup>21</sup> Ibid Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics*.

mereka sendiri. Indonesia menunda realisasi pembelian Sukhoi-35 dengan mempertahankan kerja sama dengan Rusia merupakan bentuk dialog diplomatik, sehingga Indonesia tidak kehilangan kesempatan kerja sama pertahanan di masa depan sekaligus tidak membuka konflik terbuka dengan Amerika Serikat. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian yang ditunjukkan pemerintah dalam mengikuti forum multilateral dan mempertahankan komunikasi antara mitra untuk mengurangi risiko ekonomi serta rusaknya investasi asing.

Pemerintah berhasil mempertahankan posisi netral dan tidak tergiring dalam konflik blok kekuatan, serta menjaga kebijakan luar negeri sesuai prinsip bebas aktif. Seluruh tindakan dan kebijakan diambil berdasarkan untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mengatasi ancaman CAATSA tanpa kehilangan dasar strategis nasional. Kolaborasi Indonesia dengan Amerika Serikat dalam latihan Super Garuda Shield dan bantuan Amerika Serikat dalam pembangunan Combat Training Center (CTC) membawa manfaat, untuk peningkatan kemampuan dan standar latihan.

### **3. KESIMPULAN**

Hasil analisis data dan hasil wawancara pada penelitian ini menunjukkan kesesuaian yang signifikan dengan asumsi Kenneth N. Waltz mengenai kebijakan luar negeri. Asumsi pertama, rasionalitas untuk keamanan dan kelangsungan hidup, hal tersebut mendorong potensi waiver atau pengecualian sanksi. Maka, Indonesia menunda pembelian alutsista dan meningkatkan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat melalui dialog strategis seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM), Indonesia-US Security Dialogue (IUSSD), G20. Kedua, fokus pada kekuatan relatif dan keseimbangan kekuatan. Indonesia juga menjaga keseimbangan dengan latihan bersama seperti Super Garuda Shield di tahun 2023 dan pengadaan alutsista serta melakukan diversifikasi sumber alutsista ke negara-negara lain yaitu Tiongkok (pesawat J10), India (kapal selam kelas Kilo dan rudal supersonik BrahMos), Korea Selatan (program pesawat KFX/IFX), Prancis (pesawat Dassault Rafale), Turki (pesawat KAAN), dan Brazil (Embraer EMB 314 Super Tucano), hal ini dilakukan Indonesia untuk

mencegah ketergantungan pada satu negara pemasok serta mendorong kolaborasi yang lebih kuat melawan tekanan eksternal. Ketiga, self-help dalam sistem internasional yang anarki.

Maka, Indonesia memperkuat industri pertahanan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Pindad. Indonesia juga terus melakukan upaya penguatan industri dalam negeri dengan kolaborasi bersama negara lain seperti joint ventures, joint research, joint development, lalu meminta offsite dari pengadaan pesawat untuk sustainmentnya dan komponen-komponen dalam negeri. Selain itu, Indonesia berupaya menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, untuk menaikkan jumlah SDM. Keempat, kepentingan nasional minimalis berbasis pertahanan. Dalam hal ini, Indonesia tetap menjalankan kerja sama dengan Rusia mempertahankan sikap netral dan bergabung dalam forum Brazil, Rusia, India, China, South Africa (BRICS) yang mana dalam hal ini Rusia menjadi inisiatornya. Indonesia juga memutuskan untuk terus melakukan latihan militer bersama Amerika Serikat seperti program pelatihan seperti International Military Education and Training (IMET) dan latihan bersama Super Garuda Shield.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin kehilangan akses teknologi, pelatihan, dan dukungan internasional. Indonesia melakukan diplomasi intensif dengan Amerika Serikat dan Rusia untuk memastikan bahwa kebijakan modernisasi pertahanan negara tidak menyebabkan adanya ketegangan politik atau kerugian strategis jangka panjang diiringi dengan penguatan industri dalam negeri dan diversifikasi sumber alutsista ke negara-negara lain. Menjelaskan bahwa Indonesia sebagai aktor rasional dapat mengendalikan tekanan eksternal sambil memprioritaskan keamanan, dengan mempertimbangkan dinamika kebijakan CAATSA.

## **REFERENSI**

- A D dan Ave Muhammad. "China Tawarkan Kapal Perang Berpeluru hingga Kapal Selam ke Prabowo Subianto." 2024 Agustus 11. KumparanBisnis. 2025 Juli 7.
- Agency New Tass. Su-35 Jet deal between Russia, Indonesia 'still on the table' - Russian envoy. 2025 Januari 23.
- Annisa Jihan. "Analisis Keputusan Amerika Serikat dalam Mengeluarkan Kebijakan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) Terhadap Rusia." Indonesian Journal of Global Discourse (2021): Vol. 3 No. 2.
- Helvas Alman. "Menilik Perdagangan Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat." 2023. CNBC Indonesia. 2025 Juli 5.
- Hendrajati. UU CAATSA AS Berpotensi Melumpuhkan Kedaulatan Nasional RI di Bidang Pertahanan. 2019 Oktober 24.
- Indirasari Annindya. "Kerjasama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat Pada Era Presiden Joko Widodo." Jurnal Pena Wimaya (2021): Vol. 2 No. 1.
- Kemhan.go.id. "Kunjungan Menhan India Perkuatan Hubungan RI-India." 2018 Oktober 23. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2025 Juli 7.
- Kemhan.go.id. "Menhan Prabowo Hadiri ASEAN-China Defence Ministers' Informal Meeting Secara Virtual." 2021 Juni 15. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2025 Juli 7.
- Kemhan.go.id. "Menhan Prabowo Terima Kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis." 2022 Februari 10. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2025 Juli 8.
- Kemhan.go.id. Skema Imbal Beli SU-35 Indonesia-Rusia, Tingkatkan Pertahanan dan Ekspor Nasional. 2017 Agustus 22.
- Robert Jackson Sorensen Georg. Pengantar Studi Hubungan Internasional Edisi Kelima. 2013.
- Spokesperson of The Office. CAATSA Section 231 "Imposition of Sanctions on Turkish Presidency of Defense Industries".

Waltz N Kenneth. Theory of International Politics . University of California,  
1979.